



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA PASCA PANDEMI

Arta Rusidarma Putra¹, Suflani²

^{1,2}Universitas Bina Bangsa

Email: artar.putra@gmail.com¹, suflani0780@gmail.com²

Abstrak

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah suatu kesepakatan pembangunan global yang sangat penting guna menghadapi konflik ekonomi yang sangat tinggi dan terus mengalami perubahan seperti dampak kepentingan politik dan intervensi asing yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Sustainable Development Goals yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 berdampak pada Indonesia, khususnya pada sektor ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menggambarkan kondisi ekonomi internasional yang memiliki dampak pada kondisi ekonomi di Indonesia melalui hasil penelitian yang telah dilakukan di beberapa Negara, khususnya di Asia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan sejumlah inovasi dan kebijakan agar pencapaian SDGs di bidang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dapat terwujud. Salah satu strateginya adalah menciptakan platform ekonomi digital yang menggunakan prinsip kolaborasi dari semua pihak dan memperkuat manajemen kebijakan, infrastruktur, dan sektor konsumen. Dasar pemikiran ini tidak terlepas dari kuatnya intervensi asing yang merupakan konsekuensi dari utang negara yang selalu meningkat setiap tahunnya.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, SDGs, Platform Ekonomi Digital

Abstract

The Sustainable Development Goals (SDGs) are a global development agreement that is very important to deal with very high and constantly changing economic conflicts such as the impact of strong political interests and foreign intervention. This study aims to examine how the Sustainable Development Goals approved by the United Nations in 2015 have an impact on Indonesia, especially in the economic sector. This study uses the literature study method to describe international economic conditions that have an impact on economic conditions in Indonesia through the results of research that has been conducted in several countries, especially in Asia. The research results show that a number of innovations and policies are needed in order to achieve the SDGs in the field of economic growth and employment. One of the strategies is to create a digital economy platform that uses the principle of collaboration from all parties and strengthens the management of policies, infrastructure and the consumer sector. This rationale is inseparable from the strong foreign intervention which is a consequence of the state debt which always increases every year.

Keywords: Economic Growth, SDGs, Digital Economy Platform

PENDAHULUAN

Presiden melalui kementerian desa pada tahun 2021 lalu mengungkapkan bahwa pembangunan akan berlanjut pada penguatan sumber daya manusia Indonesia. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan internasional yang mengharuskan peran pemerintah dalam mendorong adanya pembangunan dan berfokus pada kepentingan masyarakat secara global. Isu kemiskinan dan ekonomi adalah topik yang selalu menjadi langganan dalam pembahasan bagi Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga pembangunan ekonomi selalu menjadi perhatian dan fokus utama setiap rezim pemerintahan di Indonesia.

Sebanyak 189 negara mendeklarasikan program bersama yang dikenal dengan *The Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2020 dimana salah satu fokusnya adalah tentang pembenahan ekonomi Negara-negara tertinggal. Dengan adanya deklarasi ini, angka kemiskinan dunia turun hingga 50% dalam jangka waktu 15 tahun. Melihat keberhasilan ini, maka program dilanjutkan dengan tujuan yang sama dengan sedikit perubahan yang saat ini dikenal dengan nama *Sustainable Development Goals* (SDGs). Data yang dikemukakan oleh World Bank pada tahun 2015 digunakan sebagai rujukan yang menyatakan bahwa jumlah penduduk dunia yang mempunyai pendapatan 1 USD per hari dapat

menurun sampai 10,30% sejak direalisasikannya MDGs, bahkan penduduk pada taraf kemiskinan akut juga menurun mencapai 7,5% (Sihombing, 2013).

Program SDGs di Indonesia menjadi suatu program yang sangat penting untuk dapat direalisasikan mengingat konflik ekonomi sangat tinggi dan sangat berpotensi terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Konflik ekonomi yang dimaksud adalah perebutan sumber daya yang menjadi salah satu penyebab adanya kesenjangan ekonomi. Terjadinya perebutan sumber daya alam, tingginya inflasi dan minimnya lapangan kerja yang terjadi di Indonesia sangat berdampak pada laju perekonomian Indonesia dimana pertumbuhannya masih dibawah 6%. Apalagi Indonesia adalah Negara dalam kategori berkembang, sehingga sangat membutuhkan kerja keras dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi melalui berbagai macam program yang jelas dan terarah. Peningkatan perubahan ekonomi Indonesia bisa dikatakan berjalan dengan cepat.

Pergantian kepemimpinan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan paradigma ekonomi mengalami perubahan dari semua aspek. Meskipun mengalami perubahan paradigma tersebut, dominasi kapitalisme sebagai pandangan ekonomi yang kini berkembang dengan sangat pesat tidak dapat dengan begitu saja mempunyai pengaruh yang kuat dengan praktik ekonomi yang ada di Indonesia, bahkan sampai kepada satu masa dimana Indonesia pernah beralih menjadi Negara yang menganut paham ekonomi sosialis. Meskipun pada praktiknya, berbagai cara ini tidak dijalankan karena adanya pengaruh ekonomi global yang cukup kuat (Prasmuko Anugrah, 2010). Pada era Presiden Soekarno memimpin negeri ini, berbagai pandangan ekonomi yang bersumber dari ide sosialis dan liberal juga mengalami dinamisasi yang cukup intens. Presiden Soekarno yang memiliki kecenderungan untuk menggunakan sosialis sebagai pandangan ekonominya juga memiliki penentang keras dari wakil presidennya sendiri yang mengedepankan prinsip kemasyarakatan dan sedikit liberal.

Dengan adanya perubahan-perubahan yang terus terjadi dewasa ini, dinamika politik di Indonesia tidak lagi dapat dikendalikan sepenuhnya oleh Negara. Adanya peran swasta dan Negara maju juga ikut mempengaruhi terjadinya perkembangan ekonomi di Indonesia dari masa ke masa (Suprijanto, 2011). Apalagi dengan beberapa kali krisis yang dialami oleh Negara maju, membuat permintaan ekspor berkurang dan investasi yang berjalan lambat sangat berdampak pada melemahnya perekonomian di Indonesia.

Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini membuat alur distribusi dan pendapatan suatu negara mengalami penurunan secara drastis (Islam & Moyeed, 2020). Kejadian luar biasa ini membuat semua Negara tidak terlalu fokus untuk memenuhi berbagai kebutuhan infrastrukturnya sebelum pandemi usai. Beberapa Negara maju saat ini sudah melaporkan bahwa mereka mengalami resesi ekonomi karena pembiayaan untuk penanganan pandemi ini sangat menguras tenaga dan biaya yang cukup besar sehingga perekonomian mereka menjadi terganggu dan lemah. Dengan demikian, secara tidak langsung kebijakan ekonomi dan ekspansi politik juga mengalami perubahan secara signifikan. Dengan kondisi perekonomian yang tidak kondusif yang dialami oleh hampir semua Negara saat ini, membuat perusahaan juga ikut terdampak sehingga melakukan pengurangan upah kepada karyawannya, ada juga yang melakukan PHK dengan secara besar-besaran karena perekonomian yang anjlok.

Pendapatan suatu Negara juga ikut berkurang karena banyak pembiayaan yang dialihkan untuk penanganan bidang kesehatan yang membengkak. Di lain sisi, pajak juga tidak terbayarkan dengan jumlah yang sudah ditetapkan karena pendapatan perusahaan berkurang. Dengan keadaan ini, jalan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, lembaga pemerintah dan Negara itu sendiri adalah dengan menambah utang Negara. Tercatat sejak terjadinya pandemi, Indonesia sudah berhutang sebanyak 5.877 Triliun pada tahun 2020. Nilai utang Indonesia ini bisa menjadi boomerang yang akan melemahkan perekonomian Negara yang berpotensi mengalami resesi.

Oleh sebab itu, diperlukan pembangunan ekonomi yang memiliki pondasi kekuatan yang kuat agar program ekonomi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan bersifat berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam bidang pembangunan ekonomi dan lapangan pekerjaan menjadi salah satu potensi besar yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia agar pembangunan ekonomi Indonesia tidak bergantung pada kebijakan setiap rezim yang memimpin. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa melalui pelaksanaan program SDGs, Indonesia telah berhasil mengurangi angka kemiskinan menjadi 9,8 %. Selain itu, pemenuhan stok air bersih juga mengalami peningkatan menjadi 76,44% dan akses layanan kesehatan menjadi 77,78%. Program pemenuhan kebutuhan dan keterbukaan lapangan kerja yang dapat memancing pertumbuhan ekonomi dan jaminan hidup masyarakat harus diperkuat dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan merealisasikan SDGs dalam sektor pembangunan ekonomi. Masa pandemi COVID-19 ini membuat ekonomi menjadi tidak menentu. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan ekonomi yang dapat menguatkan pendapatan Negara dan masyarakat agar kehidupan masyarakat tetap dalam keadaan yang stabil secara ekonomi.

Pernyataan Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa dalam masa COVID-19 saat ini, program SDGs harus tetap berlanjut karena hal ini menjadi kewajiban Negara. Sehingga sangat wajar apabila bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat banyak dialirkan pada sektor UMKM dan sektor-sektor ekonomi lainnya agar tidak mengganggu laju pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi saat ini. Program ini diharapkan akan berdampak pada ketersediaan lapangan kerja yang memadai pasca PHK besar-besaran yang dilakukan oleh banyak perusahaan yang mengalami beban upah yang besar di tengah kondisi keuangan yang tidak menentu.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi dari program SDGs pada sektor pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja bagi Indonesia. Metode studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi internasional yang berdampak pada kondisi ekonomi di Indonesia melalui hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di beberapa Negara, khususnya di Asia. Penelitian ini diawali dengan melakukan mengkajian tentang bagaimana proses SDGs yang telah dideklarasikan oleh PBB dapat direalisasikan di Indonesia dan seberapa besar dampak SDGs tersebut bagi Indonesia dalam aspek ekonomi dengan pengukuran berbagai indikator yang ada melalui portal berita nasional dan internasional. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan berbagai macam jurnal nasional dan internasional untuk tujuan analisis dan penguatan argumentasi tentang realisasi SDGs di Indonesia pada masa pandemic *COVID-19* sebagai kajian literatur. Literatur yang digunakan ini difokuskan pada jurnal yang membahas tentang implementasi MDGs dan SDGs. Setelah itu, dilakukan analisis menggunakan *Nvivo 12 Pro* untuk mengetahui seperti apa potensi pembangunan ekonomi yang tepat bagi Indonesia kedepannya.

(Cooper, 2010) mengatakan bahwa Studi literatur merupakan salah satu jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji secara kritis sebuah gagasan, teori, atau temuan yang ada dalam sebuah literatur dengan tujuan akademik dalam berbagai kajian ilmu tertentu, dimana hasilnya akan digambarkan secara sistematis dengan menyajikan data yang diberikan penjelasan secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Nvivo 12 Pro* untuk menganalisis tentang bagaimana strategi pembangunan yang tepat bagi Negara yang berada di bagian timur dunia serta implikasinya terhadap SDGs pada sektor pembangunan ekonomi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah program dunia yang telah disahkan oleh PBB dan telah disepakati oleh 193 negara pada tahun 2015, salah satunya adalah Indonesia. Program SDGs ini sendiri yang memiliki 17 tujuan dengan target 169 yang tercapai pada tahun 2030. Pemerintah sangat gencar melakukan sosialisasi ke semua lembaga pemerintahan agar target program SDGs dapat tercapai dalam waktu yang singkat. Presiden bahkan langsung meminta menteri Pembangunan Nasional untuk bekerja keras memanfaatkan sumber daya yang ada seperti ilmu pengetahuan dan teknologi agar seluruh program berjalan dengan optimal.

Salah satu dari 17 tujuan SDGs ini adalah pembangunan ekonomi di berbagai sektor yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi adalah salah satu agenda SDGs nomor 8 yang disusun dengan tujuan meningkatkan mata pencaharian di berbagai wilayah dan membuka lapangan kerja dengan skala yang lebih besar lagi. Program ini juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan upah dan memperpendek jarak kesenjangan sosial yang selama ini terjadi antara yang kaya dan miskin (Sariguna et al., 2020). Dalam konteks ekonomi, peningkatan produksi dan konsumsi menjadi tolak ukur yang dipakai untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi masyarakat pada suatu Negara. Apabila produksi dan konsumsi mengalami peningkatan, maka dapat dikatakan bahwa ekonomi juga mengalami pertumbuhan (Pamungkas et al., 2018). Sehingga seluruh program yang dicetuskan oleh Negara dalam mengatasi problematika ekonomi akan selalu mengukur kepada bagaimana daya produksi dan konsumsi yang terjadi di masyarakat.

Indonesia sebagai negara berkembang dan sekaligus sebagai Negara global sangat berkomitmen dalam pembangunan ekonomi. Salah satu bukti yang dilakukan adalah dengan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui penguatan produksi di UMKM yang ada agar kesenjangan sosial dapat diatasi dan diselesaikan secara efektif. Oleh karena itu, Indonesia di tengah pemerintahan saat ini sangat fokus dalam melakukan pembenahan aturan agar tercipta lingkungan yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Hal ini juga didasarkan pada tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia per bulan Maret 2022 adalah 26,16 juta jiwa, sedangkan tingkat kemiskinan Indonesia pada bulan yang sama adalah sebesar 9,54%. Namun, jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2022 belum bisa menyamai capaian sebelum pandemi. Jumlah penduduk miskin dan rasio kemiskinan per bulan September 2019 sampai publikasi terakhir sebelum pandemi terjadi, masing-masing pada angka 24,78 juta jiwa dan 9,22%. Ketika pandemi di awal Maret 2020, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 26,42 juta jiwa dan tingkat kemiskinan menjadi 9,78% seperti yang terlihat pada gambar 1. Pertumbuhan ekonomi merupakan sektor yang paling mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah saat ini. Dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara besar-besaran di semua daerah, pemerintah meyakini hal ini akan membuat pertumbuhan ekonomi meningkat karena produksi dan suplai tidak terhambat. Distribusi bahan pokok dan bahan lainnya juga bisa dilakukan dengan cepat dan efisien karena akses transportasi yang memadai. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan belanja Negara karena pajak dan investasi semakin banyak.



Gambar 1. Data Kemiskinan di Indonesia terdampak COVID-19
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam berbagai perspektif ekonomi, banyak cara yang dapat dilakukan oleh Negara untuk mendapatkan anggaran yang digunakan untuk melakukan pembangunan, salah satunya melalui investasi (Auliani et al., 2019). Investasi adalah menempatkan dana pada satu atau lebih pada sebuah aset yang dikelola dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang (Owen & Walter, 2017). Sebuah Negara biasanya melakukan investasi kepada Negara lain dengan tujuan mendapatkan pendapatan dari Negara yang diberi investasi yang biasanya dalam bentuk infrastruktur dan industri.

Banyak perspektif dalam pembangunan ekonomi yang dapat digunakan agar perekonomian tetap berputar. Tetapi dalam konteks pembangunan ekonomi sebuah Negara, terdapat hal yang harus dibatasi agar lingkungan ekonomi bisa tetap terkendali dan berjalan sesuai arusnya. Ranah pemerintah dalam upaya pembangunan ekonomi berfokus pada sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Pembatasan ini dilakukan agar kekhawatiran akan terjadinya *government failure* seperti korupsi, kolusi dan nepotisme tidak terjadi karena akan sangat berpotensi mengancam stabilitas anggaran belanja Negara dan menjadi salah satu faktor internal yang dapat menghambat laju perekonomian (Rasmini & Hermanto, 2008).

Terhambatnya laju ekonomi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh berbagai faktor internal, namun ada juga faktor-faktor eksternal yang terlibat karena kebijakan organisasi internasional seperti IMF, UNICEF, WHO dan permintaan Negara asing seperti dalam urusan ekspor yang mengalami penurunan. Tercatat hingga memasuki kuartal ke 2, laju perekonomian Indonesia turun sampai 4%. Selain itu, adanya ancaman nilai tukar dollar terhadap rupiah yang semakin menguat. Dilihat hingga November 2022, nilai tukar dollar mencapai angka 15.700 rupiah per dollar Amerika dan dapat memberikan ancaman resesi bagi Indonesia.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi Indonesia harus terus dikawal oleh kebijakan politik yang mengacu pada bagaimana Negara mampu dalam beradaptasi dengan kondisi ekonomi-politik global ini. Persoalan yang seringkali diperdebatkan oleh para ahli ekonomi adalah bagaimana strategi pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan berdampak positif bagi warga negaranya. Sehingga kebijakan ekonomi yang diambil seringkali terkesan membawa kepentingan asing yang diaplikasikan sangat berbahaya bagi keberlangsungan ekonomi di Indonesia.

Terlebih pada era globalisasi saat ini, meskipun setiap Negara memiliki konsep ekonomi sendiri, namun pada prakteknya ekonomi selalu mengambil beberapa langkah yang liberal sehingga dalam beberapa situasi Negara tidak memiliki otoritas dalam membentuk pangsa pasar sendiri. Pandangan ekonomi liberal yang dimaksud adalah yang menyatakan bahwa pasarlah yang menentukan kebutuhannya sendiri sehingga Negara dan pemerintah tidak perlu ikut campur dalam menentukan pasar (Rasmini & Hermanto, 2008).

Hal ini yang menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia sebagai sebuah Negara dalam membangun ekonomi dan merumuskan suatu kebijakan. Dengan adanya dominasi global

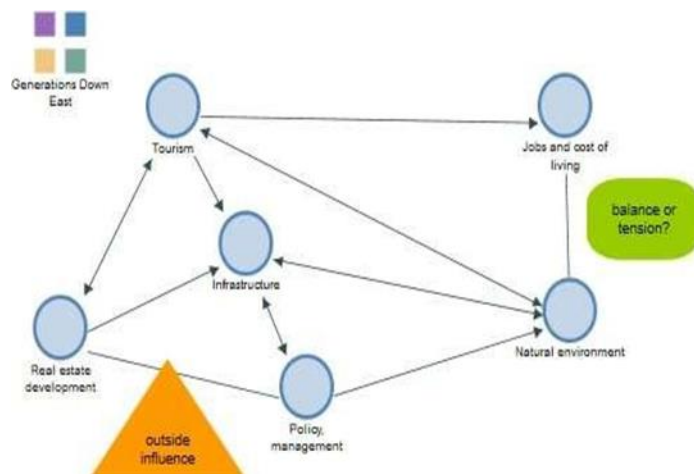
dalam aspek ekonomi dalam politik, pemerintah sebagai eksekutor kebijakan tidak bisa bergerak dengan bebas dalam menentukan apa yang harus diproduksi oleh Negara ini untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan ini, pada tahun 2030 target dari program SDGs untuk pertumbuhan ekonomi bisa tercapai (Panuluh & Fitri, 2016).

Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi

Salah satu strategi yang dibutuhkan dalam rangka mensukseskan program SDGs pertumbuhan ekonomi ini adalah dengan membuat kebijakan yang kuat dan terintegrasi dengan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat melalui media atau platform digital. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju dengan pesat, maka sangat mungkin pemerintah membuat satu platform khusus yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan sehingga kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin dapat diatasi.

Penggunaan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, sangat berpotensi untuk bisa dijalankan oleh pemerintah agar mendorong kekuatan perekonomian. Pemanfaatan platform ekonomi berbasis digital dengan meniru konsep digital marketing yang dibawa oleh para pelaku ekonomi di dunia seperti Jeff Bezos (amazon) dan Jack Ma (alibaba) dapat menjadi suatu potensi yang bisa dikembangkan untuk membangun pangsa pasar internasional. Artinya, masyarakat Indonesia tidak hanya bergantung pada pangsa pasar nasional saja, tetapi juga bisa menyentuh pasar internasional yang pada akhirnya akan tercipta kekuatan ekonomi yang menjangkau masyarakat di dunia.

Sistem ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia selama ini masih bersifat konvensional sehingga pembiayaan tidak hanya pada produksi saja, namun juga pada distribusi produk. Dalam kasus ini, Indonesia harus memiliki platform bisnis berbasis digital yang pangsa pasarnya tidak hanya mengandalkan pada jual beli antar Negara saja, tapi yang menyentuh masyarakat global. Sehingga diharapkan dengan platform bisnis digital ini, Indonesia dapat menciptakan pasar tidak hanya dalam skala makro (Negara), tetapi juga pasar dalam skala mikro (individu).



Gambar 2. Analisis Sektor Ekonomi Negara Timur /NVivo

Pada saat ini, dunia sedang berada di tengah-tengah reorganisasi ekonomi di mana pemilik platform tampaknya melakukan pengembangan kekuatan yang bahkan mungkin lebih hebat daripada pemilik pabrik di awal terjadinya revolusi industri (Kenney et al., 2019). Ide dan gagasan ini seharusnya dapat menjadi suatu langkah yang dijalankan oleh pemerintah agar pendapatan belanja Negara tidak hanya berasal dari satu sumber saja, tetapi berasal dari berbagai sumber. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan neraca keuangan yang dimiliki Negara agar tidak menambah beban hutang yang banyak dan pada akhirnya berpotensi

mempercepat pencapaian SDGs di wilayah pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja yang memadai.

Namun sebelum membentuk platform ekonomi yang kuat, produk ekonomi yang dibangun dan diperkuat juga harus jelas agar tercipta ekonomi yang sehat serta dapat berjalan dengan baik sesuai harapan (Dingwall, 2020). Merujuk pada gambar 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum pembangunan di Negara timur harus mendahulukan tiga hal yang menjadi prioritas, yaitu *tourism*, infrastruktur dan *policy management*. Dalam konteks ini, *tourism* (pengunjung) memiliki peran tidak hanya sebatas sebagai pengunjung saja, melainkan juga sebagai konsumen yang secara otomatis akan memasarkan produk ke masyarakat secara luas (Goh et al., 2019; Guchua, 2019; Panuluh & Fitri, 2016; Perzina, 2020).

Sejalan dengan prinsip “*No One Left Behind*”, SDGs juga mendorong Agenda Pembangunan Nasional menjadi lebih partisipatif dan melibatkan peran multipihak yang luas baik dari segi pemerintah maupun non pemerintah. Kebijakan-kebijakan pembangunan disusun secara bersama-sama dengan multipihak, sehingga menciptakan rasa kepemilikan atas rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) menjadi tumbuh dengan lebih kuat dan diharapkan dalam pelaksanaannya disertai tanggung jawab serta tidak akan meninggalkan siapapun. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu membuka keran ekonomi dengan melibatkan peran dari banyak pihak, khususnya masyarakat demi mencapai tujuan ekonomi yang sehat dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan strategi yang efektif untuk menarik minat pengunjung sehingga jumlahnya terus bertambah dalam jangka waktu yang singkat. Disinilah kekuatan dan peran Negara akan sangat dibutuhkan bukan untuk membangun jaringan politik, namun jaringan kerja sama ekonomi antar Negara yang menjangkau dunia internasional dengan memanfaatkan peluang bisnis yang ada dari hubungan baik yang telah terbangun dan terjaga sejak dulu. Dengan demikian, potensi perekonomian bisa diprediksi menjadi lebih kuat dan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain *tourism* (pengunjung), infrastruktur juga sangat berpengaruh pada kekuatan ekonomi karena bicara tentang suplai suatu produk apakah bisa terus berjalan dengan efisien atau tidak.

Rata-rata yang terjadi pada Negara maju, bidang ekonomi memiliki infrastruktur yang kuat agar penyaluran bahan produksi dapat berjalan efektif dan efisien serta tidak mengalami hambatan (Ishartono & Raharjo, 2016). Di Indonesia, pembangunan infrastruktur sangat gencar dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menguatkan ekonomi nasional dengan kesadaran bahwa globalisasi dapat mendorong sebuah kemajuan untuk suatu Negara yang nyata. Dalam kondisi ini, Negara tidak bisa menolak adanya perkembangan yang maju dan cepat, satu-satunya langkah adalah dengan beradaptasi terhadap perubahan tersebut.

Platform bisnis digital menjadi salah satu infrastruktur yang harus diperkuat oleh Negara agar kemandirian dalam sektor ekonomi ini bisa terwujud. Dengan hadirnya platform bisnis yang dijalankan langsung oleh pemerintah, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa platform bisnis berbasis digital ini tidak hanya dimainkan oleh individu saja, tapi juga Negara. Agar dapat direalisasikan dengan baik, berbagai ide dan gagasan yang ada harus ditopang dengan kebijakan atau aturan yang mengatur tentang bagaimana bisnis ini berjalan. Supaya tidak terjadi praktik kooptasi oleh individu, maka platform bisnis ini hanya bisa dimiliki oleh Negara saja. Dengan begitu perdagangan internasional atau ekspor tidak lagi mengandalkan cara-cara yang konvensional saja, namun juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.

Budaya ekonomi seperti inilah yang harus dibangun oleh pemerintah agar program pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu tujuan dari SDGs bisa dicapai dengan optimal pada tahun 2030 mendatang. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini jangan hanya menjadi realitas saja tanpa pemanfaatan potensi ekonomi yang ada didalamnya. Apalagi dengan situasi ekonomi politik yang didominasi oleh kebijakan ekonomi internasional yang

sangat membatasi jalannya roda perekonomian sebuah Negara, termasuk yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, Negara harus mampu membangun kekuatan ekonomi yang ramah dengan masyarakat dunia, terlebih brand Indonesia saat ini sangat baik dan banyak digemari oleh masyarakat dunia.

Peran serta dan keterlibatan masyarakat sebagai supplier perlu diperkuat dan didorong agar dapat memenuhi permintaan pasar dalam skala internasional. Pada Negara-negara maju, praktik ekonomi semacam ini belum bisa dijalankan sehingga pendapatan Negara mayoritas berasal dari pajak dan ekspor yang dikelola secara konvensional yang menyebabkan keberlangsungan perekonomian sangat terikat dari hasil pajak, hutang Negara dan ekspor saja. Apabila perilaku ekonomi semacam ini tidak diperbaharui, maka tantangan ekonomi nasional kedepannya akan jauh lebih berat dan intervensi internasional juga akan semakin menguat sehingga pada akhirnya ketergantungan Indonesia pada kebijakan internasional akan semakin menguat (Suprijanto, 2011).

Apalagi pada situasi pandemi yang belum masih melanda sampai saat ini, Negara harus membangun imperium ekonomi dengan bermacam-macam cara yang kreatif agar pertumbuhan ekonomi tetap meningkat (Perzina, 2020). Meskipun belum ada referensi yang jelas, namun ide dan gagasan ini bisa menjadi langkah yang dapat ditempuh agar pendapatan Negara diluar pajak juga bisa dihasilkan sehingga anggaran belanja bisa mengalami peningkatan yang signifikan.

Meskipun sampai saat ini Indonesia masih menggantungkan ekonominya pada perdagangan, finansial internasional dan produksi dimana hal tersebut menjadi penyebab sulitnya Indonesia untuk keluar dari tekanan internasional, namun gerakan kedaulatan ekonomi tentu harus tetap dibangun agar Indonesia dapat keluar dari belenggu ekonomi yang diintervensi oleh NTC, IMF, dan Bank Dunia. Dengan imperium bisnis yang mengandalkan kemajuan teknologi ini dan dengan dukungan dari hukum kepemilikan yang ada di tangan Negara (*policy*), tentu cepat atau lambat kedaulatan ekonomi politik dapat segera terwujud.

KESIMPULAN

Suksesnya program dunia bernama Sustainable Development Goals (SDGs) pada sektor pertumbuhan ekonomi memang sangat berat dan memiliki banyak tantangan, khususnya di Indonesia. Tidak hanya pada sektor masyarakat yang masih kurang kesadaran dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi secara mandiri, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan yang tumpang tindih. Belum lagi karena adanya pengaruh kebijakan ekonomi politik yang sampai hari ini masih mengundang perdebatan karena seringkali berubah sesuai dengan kondisi ekonomi global yang membuat Negara tidak memiliki otoritas yang kuat dalam menentukan laju pertumbuhannya sendiri (Hardin, 2017).

Hal tersebut tentu sangat berdampak pada perekonomian Negara yang hanya bersumber dari pajak dan hasil ekspor saja. Perekonomian yang belum dapat berkembang ini dikarenakan kebijakan global yang sangat mengikat. Di tengah kondisi ekonomi yang sangat tidak menentu karena dampak pandemi saat ini, hampir semua Negara mengalami degradasi yang cukup signifikan dalam laju perekonomiannya. Seperti sebuah puzzle, ekonomi dunia saat ini harus disusun satu per satu untuk menciptakan budaya ekonomi yang stabil dan sesuai dengan apa yang diharapkan (Islam & Moyeed, 2020). Apalagi ekonomi adalah suatu sarana untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah budaya ekonomi yang berpijak pada kebijakan politik yang menyentuh semua kepentingan masyarakat dunia (Owen & Walter, 2017).

Dalam menyikapi hal tersebut, kedepan Indonesia harus membangun ekosistem ekonomi yang terjalin tidak hanya dalam batas antar Negara saja, melainkan relasi ekonomi yang menyentuh personal masyarakat yang ada di setiap Negara di dunia. Hal ini akan sangat

membantu program SDGs karena ekosistem ekonomi yang saling terintegrasi dengan kepentingan nasional, internasional dan personal harus diimplementasikan sebagai upaya pembangunan ekonomi nasional. Salah satu langkahnya adalah dengan cara membangun platform bisnis digital yang tidak hanya terbatas pada relasi bilateral saja, tetapi juga mencakup relasi personal masyarakat yang juga perlu dibangun untuk membangun pasar yang lebih luas.

Pasar digital dirancang untuk tujuan perdagangan internasional yang melibatkan Negara dan masyarakatnya secara langsung memungkinkan Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang besar apabila dikelola dengan monitoring yang dilakukan oleh Negara dimana saat ini berada di tengah pasar bebas yang praktik ekonominya berjalan dengan prinsip-prinsip liberal. Khusus wilayah Asia, MEA yang diresmikan pada tahun 2015 harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh Negara agar tidak tertinggal dari Negara-negara lain.

Sebagaimana diketahui bahwa MEA tidak dapat dilepaskan dari pandangan positif dan negatif. Namun dengan adanya ketimpangan pendapatan yang dialami oleh Negara-negara ASEAN ini bisa menjadi salah satu solusi untuk dapat membangkitkan kekuatan ekonomi untuk lebih stabil. Oleh karena itu, MEA bisa berpotensi untuk pembangunan domestik dan pengembangan internasional (Rofiq, 2014). Indonesia dengan potensi kekayaan alam yang sangat besar harus mampu memanfaatkan peluang ini sebagai ajang pembangunan ekonomi demi terciptanya kemajuan Indonesia di masa yang akan datang.

Upaya ini merupakan langkah awal yang dapat dilakukan dengan tujuan akhir yang ingin dicapai adalah kedaulatan ekonomi tanpa campur tangan dunia internasional. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini memang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh IMF dan Bank Dunia karena adanya hutang Negara sehingga secara politik Indonesia sangat rentan mendapatkan gangguan dalam ekspansi ekonomi dari Internasional. Hal ini tentu bukan perkara yang mudah, namun dalam setiap langkah harus dijalankan agar kedepannya Indonesia bisa menjadi Negara yang berdaulat dan bebas menentukan nasibnya sendiri.

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian yang lebih spesifik pada pembangunan ekonomi berbasis rumah tangga agar program SDGs ini tidak hanya berdampak secara makro, tetapi juga menyentuh wilayah mikro. Masih sangat banyak poin yang bisa dijadikan topik penelitian menarik berkaitan dengan SDGs, terlebih berkenaan dengan proses realisasi program SDGs yang harus banyak dikaji agar ditemukan formulasi yang tepat sehingga program yang dijalankan dapat tepat sasaran dan dapat membantu pembangunan Indonesia kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- AbduRofiq, A. (2014). Menakar Pengaruh Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Terhadap Pembangunan Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(2).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1543>
- Aulianida, D., Liestyasari, S. I., & Ch, S. R. (2019). Sistem Ekonomi Indonesia Investasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Dingwall, J. (2020). Commercial Mining Activities in the Deep Seabed beyond National Jurisdiction: the International Legal Framework. *The Law of the Seabed*, 1(1), 139–162.
https://doi.org/10.1163/9789004391567_009
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan yang Ditempuh The Impact of the COVID-19 Pandemic on Macroeconomic Developments in Indonesia and The Policy Response taken. *Inovasi*, 16(2), 206–213. DOI:
<http://dx.doi.org/10.29264/jinv.v16i2.8255>

- Goh, X., Tong, W., & Tang, T. (2019). Financial Openness and Trade Openness Nexus : Empirical Evidence from Global Data. *Capital Marketing Review*, 27(1), 1–18.
- Guchua, A. (2019). Asymmetrical Threats and the Impact of Hybrid War on Global Security and Role of Nato in Ensuring Peace. *Ante Portas - Studia Nad Bezpieczeństwem*, 2(2), 213–224. <https://doi.org/10.33674/2201811>
- Hafizah, Y. (2005). Yulia Hafizah. Millah, 4(2), 31–46.
- Hardin, C. (2017). The politics of finance: cultural economy, cultural studies and the road ahead. *Journal of Cultural Economy*, 10(4), 325–338. <https://doi.org/10.1080/17530350.2017.1297249>
- Ishartono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan. *Share : Social Work Journal*, 6(2), 159. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198>
- Islam, M. R., & Muyeed, A. (2020). Impacts of COVID-19 Pandemic on Global Economy: a Meta-Analysis Approach. *International Journal of Technical Research & Science*, 05(05), 8–19. <https://doi.org/10.30780/ijtrs.v05.i05.002>
- Kenney, M., Bearson, D., & Zysman, J. (2019). The Platform Economy Matures: Pervasive Power, Private Regulation, and Dependent Entrepreneurs. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3497974>
- Owen, E., & Walter, S. (2017). Open economy politics and Brexit: insights, puzzles, and ways forward. *Review of International Political Economy*, 24(2), 179–202. <https://doi.org/10.1080/09692290.2017.1307245>
- Pamungkas, A. H., Sunarti, V., & Wahyudi, W. A. (2018). Peran PKBM dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3), 301. DOI : <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.101240>
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). Perkembangan pelaksanaan sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. Briefing Paper 02, infid(Sustainable Development Goals (SDGs)), 1–25. http://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Briefing_paper_No_1_SDGS_-2016-Meila_Sekar.pdf
- Perzyna, M. (2020). The Substance of Solidarity : What the Response to the COVID-19 Pandemic Says About the Global Refugee Regime The Substance of Solidarity : What the Response to the COVID-19 Pandemic Says About the Global Refugee Regime.
- Prasmuko, A., & Anugrah, D. F. (2010). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perekonomian Daerah. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 12(3), 377–411. <https://doi.org/10.21098/bemp.v12i3.242>
- Rasmini, M., & Hermanto, B. (2008). Konsep Sistem Ekonomi Indonesia. 1–54. Sariguna, P., Kennedy, J., & Ekonomi, F. (2020). Modul ekonomi pembangunan.
- Sihombing, L. (2013). Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). 4(Mei), 129–156.
- Suprijanto, A. (2011). Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, I(2), 100–119. file:///C:/Users/user/Downloads/592-929-1-SM.pdf DOI: <https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/Juli.592>